

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

Wahyu Setyaningsih¹, Adolf Z. D. Siahay², Syaikhul Falah³

Magister Keuangan Daerah, Universitas Cenderawasih, Indonesia

Email: wahyuzettya@gmail.com

Article History

Received: 19-11-2025

Revision: 09-12-2025

Accepted: 14-12-2025

Published: 11-01-2025

Abstract. *This study aims to analyse the influence of apparatus competence, internal control systems, and regulatory compliance on the effectiveness of Regional Property Management (BMD) in the Teluk Bintuni Regency Local Government, both partially and simultaneously. The research was conducted in Teluk Bintuni Regency using a quantitative approach. Primary data was obtained through a Google Form-based questionnaire administered to 65 respondents selected using purposive sampling, while secondary data was obtained from official documents and related literature. The research instrument was a Likert scale questionnaire that had been tested for validity and reliability. Data analysis was performed using multiple linear regression with SPSS software, preceded by classical assumption tests (normality, multicollinearity, heteroscedasticity). The results showed that: (1) the competence of officials had a significant effect on the effectiveness of BMD management; (2) the internal control system had no significant effect on the effectiveness of BMD management; (3) regulatory compliance has a significant effect on the effectiveness of BMD management; and (4) simultaneously, the three independent variables have a significant effect on the effectiveness of BMD management. These findings indicate that improving the competence of officials and compliance with regulations are key factors in realising orderly, accountable, and efficient regional asset management, while the effectiveness of the internal control system needs to be improved through better communication and asset recording.*

Keywords: *competence of officials, internal control system, regulatory compliance, BMD management, Teluk Bintuni Regency*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, serta kepatuhan regulasi terhadap efektivitas penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Teluk Bintuni dengan pendekatan kuantitatif. Data primer diperoleh melalui kuesioner berbasis Google Form kepada 65 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi dan literatur terkait. Instrumen penelitian berupa angket berskala Likert yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak SPSS, serta didahului uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penatausahaan BMD; (2) sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penatausahaan BMD; (3) kepatuhan regulasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penatausahaan BMD; dan (4) secara simultan ketiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penatausahaan BMD. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola aset daerah yang tertib, akuntabel, dan efisien, sementara efektivitas sistem pengendalian internal perlu ditingkatkan melalui perbaikan komunikasi dan pencatatan aset.

Kata Kunci: kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, kepatuhan regulasi, penatausahaan BMD, Kabupaten Teluk Bintuni

How to Cite: Setyaningsih, W., Siahay, A.Z.D., Falah, S. (2025). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni*. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (4), 7777-7791. [10.54373/ifiheb.v5i4.4576](https://doi.org/10.54373/ifiheb.v5i4.4576)

PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Namun, banyak pemerintah daerah masih menghadapi persoalan penatausahaan aset, seperti pencatatan yang tidak akurat, ketidaksesuaian data antarinstansi, dan lemahnya pengendalian internal, yang berdampak pada kualitas laporan keuangan serta berpotensi menimbulkan kerugian negara. Kondisi ini tampak jelas di Kabupaten Teluk Bintuni, di mana hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat aset yang belum tercatat lengkap, belum memiliki dokumen kepemilikan, dan terjadi ketidaksesuaian data antara pengguna barang dan pengelola barang. Situasi tersebut menjadikan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penatausahaan BMD menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan.

Kabupaten Teluk Bintuni dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik dan permasalahan aset daerah yang berbeda dari daerah lain. Nilai aset daerah terus meningkat hingga lebih dari Rp6,5 triliun pada tahun 2023, namun masih diwarnai lemahnya pencatatan dan penatausahaan. Tingkat kompetensi aparatur yang menangani BMD juga relatif rendah, tercermin dari hanya enam bendahara barang yang bersertifikat dari total 53 orang, sementara kompleksitas kondisi geografis dan demografis turut menyulitkan proses inventarisasi dan pengawasan aset. Kesenjangan antara kelengkapan regulasi dan lemahnya implementasi di lapangan menjadikan Teluk Bintuni sebagai objek penelitian yang memiliki nilai strategis.

Penelitian ini memfokuskan pada tiga variabel utama, yaitu kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan regulasi yang secara teoritis dan empiris berkaitan dengan efektivitas penatausahaan BMD. Kompetensi aparatur menentukan kemampuan dalam memahami regulasi, mengoperasikan sistem informasi aset, dan melakukan pencatatan yang akurat. Sistem pengendalian internal berfungsi memastikan proses penatausahaan berjalan sesuai standar dan bebas penyimpangan, sementara kepatuhan regulasi menjamin prosedur penatausahaan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketiga variabel tersebut saling berinteraksi dalam membentuk kualitas penatausahaan, sehingga perlu dianalisis secara simultan untuk mengetahui pengaruh paling dominan dalam konteks pemerintahan daerah.

Kesenjangan penelitian terlihat dari temuan sebelumnya yang menunjukkan hasil berbeda terkait hubungan antarvariabel penelitian. Beberapa studi (misalnya Sayoga & Yudianto, 2023; Bahri, 2017) menemukan kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan aset, sementara Listiani & Agustin (2022) melaporkan sebaliknya. Penelitian mengenai sistem pengendalian internal umumnya menunjukkan pengaruh positif terhadap penataan aset (Manalu & Yudianto, 2023; Muhlisoh et al., 2023; Satria & Perbowo, 2020), dan Safkaur

(2021) menekankan pentingnya integritas data, sedangkan Soro et al. (2024) dan Sembiring et al. (2023) menemukan kepatuhan regulasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan BMD. Namun, belum terdapat penelitian kuantitatif yang menguji ketiga variabel tersebut secara simultan dalam konteks Kabupaten Teluk Bintuni dengan mempertimbangkan temuan BPK terbaru dan kondisi aktual aparatur.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis empiris pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan regulasi, baik secara parsial maupun simultan, terhadap efektivitas penatausahaan BMD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur manajemen aset daerah dan memberikan pemahaman baru mengenai faktor dominan yang memengaruhi efektivitas penatausahaan di daerah dengan karakteristik khusus seperti Teluk Bintuni. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset, memperkuat kapasitas aparatur, serta memperbaiki mekanisme pengendalian internal dan kepatuhan regulasi. Pada akhirnya, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi strategis guna mewujudkan tata kelola BMD yang tertib, akurat, dan akuntabel sesuai prinsip *good governance*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori untuk menguji hubungan kausal antarvariabel melalui pengujian hipotesis. Lokasi penelitian adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang dipilih secara purposif karena memiliki kompleksitas permasalahan penatausahaan aset serta temuan BPK terkait kelemahan pencatatan BMD.

Populasi penelitian berjumlah 160 pegawai pada berbagai OPD yang menangani BMD. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan menghasilkan 65 responden yang memiliki tugas dan pengetahuan terkait pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset. Responden terdiri dari Pengurus Barang, Kuasa Pengguna Barang, pejabat dan staf BPKAD, tim inventarisasi, auditor internal, subbagian aset, serta operator SIMDA BMD.

Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner Google Form dengan skala Likert lima poin, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi berupa laporan keuangan, LHP BPK, laporan inventarisasi BMD, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah. Instrumen penelitian disusun berdasarkan definisi operasional variabel: kompetensi aparatur (pengetahuan, keterampilan, nilai, kemampuan, sikap), sistem pengendalian internal (lingkungan pengendalian, penilaian

risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan), kepatuhan regulasi (informasi, insentif, keahlian, kekuasaan rujukan, otoritas sah), serta indikator penatausahaan BMD sesuai Permendagri 47/2021.

Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi Pearson dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha dengan batas minimum 0,70. Data yang valid dan reliabel kemudian dianalisis melalui regresi linier berganda menggunakan SPSS. Sebelum dilakukan regresi, data diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t (parsial), uji F (simultan), serta koefisien determinasi (R^2) untuk melihat besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dianalisis berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan masa kerja untuk menggambarkan profil pegawai OPD yang terlibat dalam penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Teluk Bintuni. Identifikasi ini memastikan bahwa responden merupakan individu yang relevan dan memiliki pemahaman mengenai proses pengelolaan aset daerah. Ringkasan karakteristik responden ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Jenis kelamin	Pria	45	69,2%
	Wanita	20	30,8%
Usia	< 25 tahun	5	7,7%
	25–35 tahun	10	15,4%
	35–45 tahun	30	46,2%
	45–55 tahun	15	23,1%
	> 55 tahun	5	7,7%
Pendidikan	Diploma	10	15,4%
	S1	40	61,5%
	S2	15	23,1%
Masa Kerja	1–3 tahun	8	12,3%
	4–6 tahun	30	46,2%
	7–10 tahun	15	23,1%
	> 10 tahun	12	18,4%

Sumber: Data primer, 2025

Secara umum, responden didominasi oleh laki-laki dan berada pada kelompok usia 35–45 tahun, menunjukkan keterlibatan pegawai pada usia produktif dalam pengelolaan aset daerah. Mayoritas memiliki pendidikan S1 dan masa kerja 4–6 tahun, sehingga dapat diasumsikan

memiliki pengalaman dan pemahaman yang memadai terkait penatausahaan BMD. Dengan demikian, karakteristik responden dianggap relevan dan mendukung kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Analisis Instrumen

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap item pernyataan pada kuesioner mampu mengukur variabel penelitian secara tepat. Berdasarkan kriteria nilai Corrected Item-Total Correlation $> 0,30$, seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan dalam analisis berikutnya. Hasil uji validitas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Uji validitas instrumen

Kompetensi aparatur (X1)	r-kritis	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1.1	0,30	.613	Valid
x1.2	0,30	.655	Valid
x1.3	0,30	.686	Valid
x1.4	0,30	.814	Valid
x1.5	0,30	.572	Valid
Sistem pengendalian internal (X2)	r-kritis	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x2.1	0,30	.739	Valid
x2.2	0,30	.741	Valid
x2.3	0,30	.691	Valid
x2.4	0,30	.695	Valid
x2.5	0,30	.809	Valid
Kepatuhan regulasi (X3)	r-kritis	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x3.1	0,30	.463	Valid
x3.2	0,30	.688	Valid
x3.3	0,30	.669	Valid
x3.4	0,30	.738	Valid
x3.5	0,30	.428	Valid
Penatausahaan BMD (Y)	r-kritis	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
y.1	0,30	.556	Valid
y.2	0,30	.562	Valid
y.3	0,30	.508	Valid
y.4	0,30	.619	Valid
y.5	0,30	.526	Valid

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2025

Secara keseluruhan, seluruh item pada variabel kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, kepatuhan regulasi, dan penatausahaan BMD menunjukkan nilai korelasi di atas 0,30. Dengan demikian, seluruh indikator dinyatakan valid dan dapat digunakan pada tahap analisis selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi jawaban responden terhadap item-item pernyataan dalam kuesioner. Suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2018). Hasil pengujian reliabilitas untuk seluruh variabel penelitian ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil uji reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Kesimpulan
Kompetensi aparatur (X1)	0.847	Reliabel
Sistem pengendalian internal (X2)	0.887	
Kepatuhan regulasi (X3)	0.808	
Penatausahaan BMD (Y)	0.780	

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2025

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,60. Dengan demikian, seluruh variabel dinyatakan reliabel, yang berarti instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang baik dan dapat digunakan pada tahap analisis berikutnya.

Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan persepsi responden terhadap variabel Kompetensi Aparatur (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), Kepatuhan Regulasi (X3), dan Penatausahaan BMD (Y). Penilaian menggunakan skala Stevens (2001), di mana skor 4,20–5,00 dikategorikan sangat baik.

Variabel Kompetensi Aparatur (X1) memperoleh rata-rata 4,49, termasuk kategori sangat baik. Indikator Pengetahuan menjadi yang tertinggi (4,60), menunjukkan kemampuan aparatur dalam memahami regulasi dan teknis pengelolaan aset sudah sangat kuat. Indikator Sikap mencatat nilai terendah (4,32), yang meskipun berada pada kategori tinggi, namun mengindikasikan perlunya peningkatan etika kerja dan komitmen dalam penatausahaan aset.

Variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) memiliki nilai rata-rata 4,36. Lingkungan Pengendalian menjadi indikator tertinggi (4,45), menandakan bahwa struktur organisasi dan budaya kerja telah mendukung pelaksanaan pengendalian. Sebaliknya, indikator Informasi dan Komunikasi memperoleh nilai terendah (4,20), menunjukkan masih perlunya penguatan arus informasi antarunit untuk mendukung efektivitas pengendalian aset.

Variabel Kepatuhan Regulasi (X3) mencatat rata-rata 4,26. Indikator Informasi menjadi yang tertinggi (4,40), menandakan bahwa aturan dan pedoman pengelolaan aset sudah tersosialisasi dengan baik. Namun, indikator Imbalan memiliki nilai terendah (4,17), mengindikasikan belum optimalnya mekanisme penghargaan terhadap kepatuhan prosedural.

Variabel Penatausahaan BMD (Y) memiliki rata-rata 4,37, termasuk kategori sangat baik. Indikator Kodefikasi (4,48) dan Inventarisasi (4,46) menunjukkan bahwa pelabelan dan pendataan aset telah berjalan tertib dan sistematis. Indikator Pencatatan memperoleh nilai terendah (4,20), mencerminkan masih adanya kendala dalam kelengkapan dan ketepatan waktu pencatatan aset.

Secara keseluruhan, seluruh variabel berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa proses penatausahaan BMD di Kabupaten Teluk Bintuni telah berjalan baik, namun aspek sikap aparatur, efektivitas komunikasi internal, sistem penghargaan, dan kualitas pencatatan aset perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk memperkuat akuntabilitas dan mutu pengelolaan aset daerah.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian menggunakan *One Sample Kolmogorov–Smirnov Test* dengan tingkat signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.36675468
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.067
	Negative	-.076
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Hasil pengolahan data, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200, yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, residual dalam model regresi dinyatakan berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model dinyatakan bebas multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 . Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil uji multikolinearitas

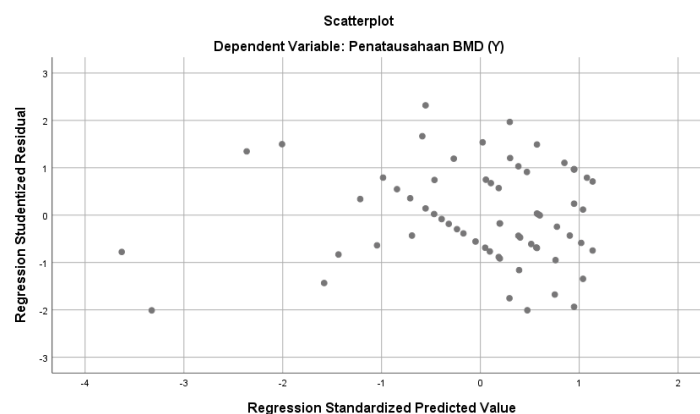
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kompetensi aparatur (X1)	.431	2.320
Sistem pengendalian internal (X2)	.545	1.833
Kepatuhan regulasi (X3)	.447	2.239

Sumber: Hasil pengolahan data, 2025

Berdasarkan hasil tersebut, seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* di atas 0,10 dan *VIF* di bawah 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami multikolinearitas dan seluruh variabel independen layak digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Model yang baik seharusnya bersifat homoskedastisitas atau tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Pengujian dilakukan dengan melihat pola titik pada grafik *scatterplot* antara *SRESID* dan *ZPRED*. Model dinyatakan bebas heteroskedastisitas apabila titik-titik pada grafik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu.



Gambar 1. Hasil uji heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik *scatterplot*, titik-titik data tampak menyebar acak dan tidak menunjukkan pola tertentu seperti gelombang, melebar, atau menyempit. Penyebaran yang acak di sekitar garis nol menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi heteroskedastisitas dalam model ini telah terpenuhi.

Hasil Analisis Inferensial

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur (X1), sistem pengendalian internal (X2), dan kepatuhan regulasi (X3) terhadap penatausahaan BMD (Y). Hipotesis diuji pada taraf signifikansi 0,05 dengan membandingkan nilai signifikansi dan koefisien pada model regresi.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6. Nilai koefisien determinasi uji regresi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.812 ^a	.660	.643	1.400

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan regulasi (X3), Sistem pengendalian internal (X2), Kompetensi aparatur (X1)

b. Dependent Variable: Penatausahaan BMD (Y)

Sumber: Hasil pengolahan data, 2025

Nilai R Square sebesar **0,660** menunjukkan bahwa 66% variasi penatausahaan BMD dapat dijelaskan oleh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan regulasi. Sisanya, 34% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Uji ANOVA (Uji F)

Tabel 7. Hasil uji ANOVA

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	232.201	3	77.400	39.492	.000 ^b
	Residual	119.553	61	1.960		
	Total	351.754	64			

a. Dependent Variable: Penatausahaan BMD (Y)

b. Predictors: (Constant), Kepatuhan regulasi (X3), Sistem pengendalian internal (X2), Kompetensi aparatur (X1)

Sumber: Hasil pengolahan data, 2025

Nilai F sebesar 39.492 dengan signifikansi 0.000 (< 0.05) menunjukkan bahwa model regresi secara simultan signifikan. Artinya, ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penatausahaan BMD.

Uji Regresi Parsial (Uji t)**Tabel 8.** Hasil uji regresi

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	7.681	1.331	5.771	.000
	Kompetensi aparatur (X1)	.186	.078	2.380	.020
	Sistem pengendalian internal (X2)	.110	.070	1.565	.123
	Kepatuhan regulasi (X3)	.358	.083	4.291	.000

a. Dependent Variable: Penatausahaan BMD (Y)

Sumber: Hasil pengolahan data, 2025

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh persamaan regresi berikut:

$$Y = 7.681 + 0.186X_1 + 0.110X_2 + 0.358X_3$$

Interpretasi hasil regresi menunjukkan bahwa kompetensi aparatur (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penatausahaan BMD, ditunjukkan oleh koefisien sebesar 0,186 dan nilai signifikansi 0,020. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur, semakin baik kualitas penatausahaan aset yang dapat dicapai. Sebaliknya, sistem pengendalian internal (X2) memiliki koefisien positif sebesar 0,110 namun tidak signifikan (Sig 0,123), sehingga peningkatan pengendalian internal belum memberikan dampak kuat terhadap efektivitas penatausahaan BMD. Variabel kepatuhan regulasi (X3) menunjukkan pengaruh paling kuat dengan koefisien 0,358 dan nilai signifikansi 0,000, menggambarkan bahwa kepatuhan yang tinggi terhadap ketentuan dan prosedur pengelolaan aset berkontribusi signifikan terhadap optimalnya penatausahaan BMD.

Secara simultan, ketiga variabel independen terbukti berpengaruh signifikan terhadap penatausahaan barang milik daerah, namun secara parsial hanya kompetensi aparatur dan kepatuhan regulasi yang menunjukkan pengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa faktor individu dan kepatuhan terhadap aturan memegang peran lebih dominan dibandingkan mekanisme pengendalian internal dalam mendorong efektivitas penatausahaan aset daerah.

DISKUSI**Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Penatausahaan Barang Milik Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap penatausahaan BMD, dengan koefisien 0,186 dan signifikansi 0,020. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap kerja aparatur berkontribusi langsung pada perbaikan kualitas pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset. Rata-rata indikator pengetahuan yang tinggi (4,60) memperlihatkan bahwa

aspek kognitif merupakan faktor dominan dalam mendukung efektivitas penatausahaan BMD. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan pandangan Wibowo (2017) serta hasil penelitian Sayoga & Yudianto (2023), Latuharhary et al. (2021), dan Sevtimo (2017) yang menekankan pentingnya kompetensi aparatur dalam pengelolaan aset daerah. Nilai indikator sikap yang lebih rendah (4,32) menunjukkan perlunya penguatan etos kerja, integritas, dan kedisiplinan, karena kelemahan pada aspek ini turut memengaruhi ketepatan dan ketertiban pencatatan aset. Dengan demikian, peningkatan kompetensi aparatur—melalui pelatihan, sertifikasi, dan penguatan etika profesional—merupakan langkah strategis dalam memperbaiki efektivitas penatausahaan BMD di Kabupaten Teluk Bintuni.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penelitian menemukan bahwa sistem pengendalian internal memiliki koefisien positif sebesar 0,110 namun tidak signifikan (Sig 0,123). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kerangka pengendalian internal belum memberikan pengaruh kuat terhadap ketertiban administrasi aset. Temuan ini tidak sepenuhnya selaras dengan konsep pengendalian internal menurut Hery (2013) dan PP No. 60 Tahun 2008, yang menekankan pentingnya pengendalian dalam menjamin keandalan informasi dan perlindungan aset. Indikator lingkungan pengendalian memiliki nilai tertinggi (4,45), namun aspek informasi dan komunikasi memperoleh nilai terendah (4,20), mengindikasikan bahwa alur komunikasi internal belum berjalan optimal. Kelemahan komunikasi ini menyebabkan ketidaksinkronan pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset, sehingga pengendalian internal tidak berdampak signifikan. Temuan ini sejalan dengan Putra (2012) dan Anthoni et al. (2016) yang menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan koordinasi antarunit. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme koordinasi, optimalisasi komunikasi, dan digitalisasi pencatatan aset agar sistem pengendalian internal dapat berfungsi secara efektif.

Pengaruh Kepatuhan Regulasi terhadap Penatausahaan Barang Milik Daerah

Kepatuhan regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penatausahaan BMD, dengan koefisien 0,358 dan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prosedur sesuai ketentuan—mulai dari pengadaan hingga pelaporan—memiliki kontribusi besar terhadap ketertiban dan akurasi penatausahaan aset. Temuan ini konsisten dengan teori Halim (2008) serta model kepatuhan Taylor (2000) yang menekankan peran otoritas dan norma dalam mendorong kepatuhan. Indikator informasi menjadi yang tertinggi (4,40), menandakan bahwa pedoman dan aturan sudah tersampaikan dengan baik. Namun, indikator imbalan berada pada posisi terendah (4,17), menunjukkan belum optimalnya sistem penghargaan untuk

memotivasi kepatuhan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Handayani & Sari (2023), Kasmardin (2023), dan Soro et al. (2024) yang menekankan pengaruh signifikan regulasi terhadap kualitas pengelolaan aset. Dengan demikian, kepatuhan regulasi merupakan faktor dominan dalam mendorong efektivitas penatausahaan BMD di Kabupaten Teluk Bintuni.

Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, dan Kepatuhan Regulasi secara Simultan

Uji simultan menghasilkan nilai F sebesar 39,492 dengan signifikansi 0,000, sehingga ketiga variabel independen terbukti secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penatausahaan BMD. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penatausahaan aset merupakan hasil kombinasi kualitas aparatur, keberadaan kerangka pengendalian internal, serta tingkat kepatuhan terhadap regulasi. Temuan ini sejalan dengan *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976) yang menekankan pentingnya pengawasan dan kepatuhan dalam memastikan aparatur bekerja sesuai kepentingan publik sebagai prinsipal. Meskipun hanya dua variabel yang signifikan secara parsial, model secara keseluruhan membuktikan adanya hubungan struktural yang kuat antarvariabel dalam mendorong penatausahaan BMD yang tertib, akurat, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Teluk Bintuni sangat dipengaruhi oleh kualitas aparatur dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi, sementara sistem pengendalian internal belum memberikan kontribusi yang signifikan. Kompetensi aparatur terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penatausahaan BMD; semakin baik pengetahuan, pemahaman, kemampuan, dan sikap kerja pegawai, semakin tertib pula proses pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset. Namun demikian, temuan bahwa aspek sikap masih relatif lebih rendah dibandingkan aspek pengetahuan mengindikasikan bahwa profesionalisme dan internalisasi nilai-nilai kerja belum sepenuhnya seimbang dengan kapasitas teknis yang dimiliki. Di sisi lain, sistem pengendalian internal secara struktural telah tersedia melalui kebijakan dan prosedur, tetapi lemahnya komunikasi internal dan belum optimalnya pencatatan aset menyebabkan sistem ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas penatausahaan BMD. Sebaliknya, kepatuhan regulasi terbukti menjadi faktor kunci; aparatur yang memahami dan mematuhi aturan pengelolaan aset cenderung mampu melaksanakan pengadaan, pencatatan, pelabelan, inventarisasi, dan pelaporan secara lebih tertib dan akuntabel, meskipun mekanisme penghargaan atas kepatuhan masih belum memadai. Secara simultan, kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal,

dan kepatuhan regulasi berpengaruh signifikan terhadap penatausahaan BMD, menguatkan pandangan teori keagenan bahwa kombinasi kualitas agen, mekanisme pengendalian, dan kepatuhan terhadap regulasi diperlukan untuk menjaga agar pengelolaan aset publik berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat sebagai prinsipal.

Berdasarkan hasil tersebut, penguatan tata kelola BMD di Kabupaten Teluk Bintuni perlu diarahkan tidak hanya pada perbaikan aspek teknis, tetapi juga pada dimensi perilaku, sistem, dan kebijakan secara terpadu. Pemerintah daerah disarankan untuk mengembangkan program pelatihan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis penatausahaan aset, tetapi juga pada pembentukan sikap, etika kerja, dan komitmen terhadap akuntabilitas publik. Penguatan sistem pengendalian internal perlu diarahkan pada perbaikan alur komunikasi dan integrasi sistem informasi aset sehingga proses pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Di sisi lain, kepatuhan terhadap regulasi dapat ditingkatkan melalui kombinasi sosialisasi aturan yang berkelanjutan dan penerapan sistem penghargaan maupun konsekuensi yang jelas, sehingga pegawai tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga termotivasi untuk menjaga ketertiban administrasi aset. Dalam jangka panjang, kebijakan pengelolaan BMD idealnya mengintegrasikan peningkatan kompetensi, penguatan pengendalian internal, dan penguatan kepatuhan regulatif dalam satu kerangka kebijakan yang konsisten, didukung monitoring berkala dan komitmen pimpinan daerah.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, antara lain ruang lingkup yang hanya mencakup satu pemerintah daerah, penggunaan tiga variabel utama tanpa memasukkan faktor lain seperti budaya organisasi, gaya kepemimpinan, atau dukungan anggaran, serta ketergantungan pada data persepsi melalui kuesioner yang berpotensi subjektif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek pada beberapa daerah berbeda, menambahkan variabel konteks organisasi, serta mengombinasikan kuesioner dengan data observasi lapangan, studi dokumen, atau wawancara mendalam. Dengan demikian, pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penatausahaan BMD dapat menjadi lebih komprehensif dan hasil penelitian memiliki daya jelaskan dan daya generalisasi yang lebih kuat.

REFERENSI

- Anthoni, R., Rachmina, D., & Andati, T. (2016). Strategi penguatan sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah kabupaten bogor. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 8(2). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v8i2.24822

- Bahri, S. (2017). *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap penatausahaan barang milik daerah dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:149996762>
- Boulter, N., M. Dalziel, N. J. (2003). *People and Competencies: The Route to Competitive Advantage*. New York, John Wiley & Sons, Inc.
- Bryant, A., Taylor, S., & Woodhams, C. (2022). *Human resource management*. Harvard Business Press.
- Christina. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Jurnal Liabilitas*, 4(1), 1–20. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v4i1.44>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete*. Universitas. Diponegoro, Semarang.
- Halim, A. (2008). *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. YKPN.
- Hambali. (2010). *Inventarisasi Barang Milik Negara*. Politeknik Negeri Bandung.
- Handayani, M., & Sari, D. M. (2023). Pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) dan Regulasi terhadap Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA)*, 10(1).
- Hariyono, A. (2007). *Prinsip dan Teknik Manajemen Kekayaan Negara: Modul Pelatihan. Jakarta: Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara (Diklat Jarak Jauh)*. Jakarta: Departemen Keuangan RI Badan Diklat Keuangan Pusdiklat Keuangan Umum.
- Kasmardin, K. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara Pada UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 8(3).
- Krismiaji. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi (Edisi ke-3)*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Kumaat. (2011). *Audit Internal*. Erlangga, Jakarta.
- Latuharhary, J. T., Mantiri, M. S., & Sampe, S. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah (Studi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon). *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 10(1), 1–12.
- Listiani, L., & Agustin, H. (2022). Pengaruh Inventarisasi, Kompetensi Aparatur, dan Pengendalian Internal terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:254326662>
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja sektor publik*. UPP AMP YKPN.
- Moehariono. (2018). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Morallos, & Amekudzi. (2008). *Public Private Partnership of Infrastructure, Lecture Handout: A Review of Valuefor Money (VfM) Analysis for Comparing Public Private Partnerships to Traditional Procurements*. Los Angeles: University of Southern California.
- Mukharofah, M., & Kaukab, M. E. (2022). Peran Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Menilai Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 2(4), 32–52. <https://doi.org/10.32699/jamasy.v2i4.3305>
- Mulyadi. (2016). *Psikologi Sosial*. Gunadarma, Jakarta.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat, Jakarta.
- Nursalam, D. (2014). *Manajemen Keperawatan" Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional*. Salemba Medika.
- Pangaribuan, & Sumini. (2010). *Modul: Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Jakarta.

- Prihadi, S. (2014). *Assessment Centre: Identifikasi, pengukuran dan Pengembangan Kompetensi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Putra, A. (2012). *Analisis Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun*.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi (Edisi ke-13)*. Salemba Empat, Jakarta.
- Salsabila Ar-Ruum Sayoga, & Ivan Yudianto. (2023). Pengaruh Komitmen Pimpinan dan Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Cimahi. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 105–124. <https://doi.org/10.30640/trending.v2i1.1916>
- Sayoga, S. A.-R., & Yudianto, I. (2023). Pengaruh Komitmen Pimpinan dan Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Cimahi. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:272767351>
- Sevtime, D. (2017). *Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Riau)*.
- Siregar. (2004). *Manajemen Aset, Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soleh, C. dan R., & Heru. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Fokusmedia.
- Soro, C. P. L., Sonbay, Y. Y., Bibiana, R. P., Perseveranda, M. E., & Adrianus, J. S. (2024). Pengaruh Kepatuhan Pada Regulasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Pimpinan Terhadap Pengelolaan Aset Tetap oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(2), 1884. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i2.5408>
- Sugiyama. (2013). *Manajemen Aset Pariwisata*. Guardaya Intimarta, Bandung.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sutrisno, E. (2016). *Human Resources Management*. Kencana.
- Sutrisno, M. (2004). *An Investigation of Participation Project Appraisal in Developing Countries Using Elements of Value an Risk Management (Volume 1)*. Manchester: University of Manchester Institute.
- Taylor, B. (2000). *Obedience to Authority: Current Perspectives on the Milgram Paradigm*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja*. PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Wilkinson. (2013). *Buku Saku Diagnosis Keperawatan: diagnosis NANDA, Intervensi NIC*. EGC, Jakarta.
- Winarno. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo, Yogyakarta.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.